

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA OBAT YANG BERBAHAYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI
KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)**



DISUSUN OLEH :

AMRIJAL

11327102592

STRATA SATU (S1)

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UIN SUSKA RIAU

2020



PENGESAHAN

ipsi dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)*” yang ditulis oleh :

Nama : **AMRIJAL**
 NIM : 11327102592
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Seekretaris
Oni Alim, SH., MH

Penguji
Hj. Nurjini Sahu, SH., MH

Penguji II
H. Mhd Kastulani, SH., MH

(Signatures of the Munaqasah Panel Members)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)*" yang ditulis oleh :

Nama : **AMRIJAL**
 NIM : 11327102592
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Jon Alizon, SH., MH

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
H. Nhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pemelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

AMRIJAL

11327102592

ILMU HUKUM

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)

Joni Alizon, SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Pimpinan Redaksi



FM. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan tidak merendahkan atau memperbandingkan keparipatiran yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMRIJAL
NIM : 11327102592
Tempat/Tanggal Lahir : Ajamu, 29 April 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Maret 2020
Yang membuat pernyataan



(Signature)
AMRIJAL

NIM. 11327102592

Judul :perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi di kecamatan tampan pekanbaru)

Rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?, 2) Bagaimana tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah dengan cara melaksanakan peraturan yang berlaku dengan tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang juga pemberian ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha adalah tidak akan menjual dan melakukan pengembalian kepada distributor atas jenis-jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dan melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang sudah terlanjur membeli jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, jamu tradisional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mengikuti ujian *Oral Comprehensive* Sarjana Lengkap pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kelemahan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang merupakan motivasi utama bagi penulis yang tidak henti memberikan kasih sayang, bantuan materi, do'a yang tulus dan tidak terhingga, pelajaran berharga serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.A selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum , beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. H Maghfirah M.A selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum , beserta jajarannya.
7. Bapak Joni Alizon, SH, MH yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi Amal Jariyah, *Amin Ya robbal Alamin*.
8. Bapak Firdaus, SH, MH sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang senan tiasa memberi dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
9. Bapak Syafrilnaldi, SH, MA sebagai Penasehat Akademis
10. Bapak / Ibu dosen serta Asisten dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
11. Untuk teman temanku di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013 , semoga kita semua sukses dalam menggapai cita cita.
12. Sahabat-sahabat KKN UTAMA KARYA, KEC, KAMPAR KIRI TENGAH KAB, KAMPAR yang telah bersama sama selama menjalani masakn dan telah banyak mengukir kisah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

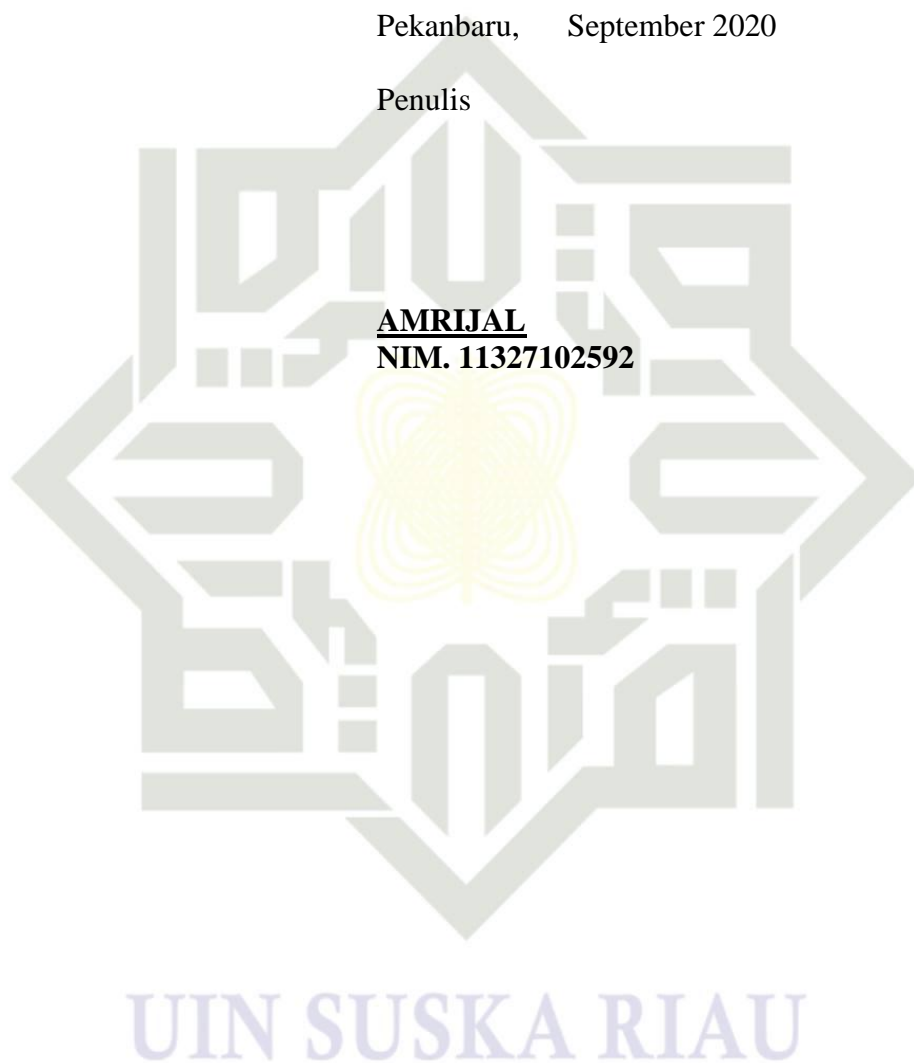
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Tuhan memberikan berkat atas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, September 2020

Penulis

AMRIJAL
NIM. 11327102592



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang Penelitian	1
B Batasan Masalah.....	8
C Rumusan Masalah.....	8
D Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E Studi Kepustakaan	10
F Lokasi Penelitian	17
G Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	22
B Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab	24
C Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	27
D Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	32
E Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.	37
B Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan	38
C Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru	39
D Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	39
E Aktivitas Badan Pengawas Obat dan Makanan	40
F Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru	42

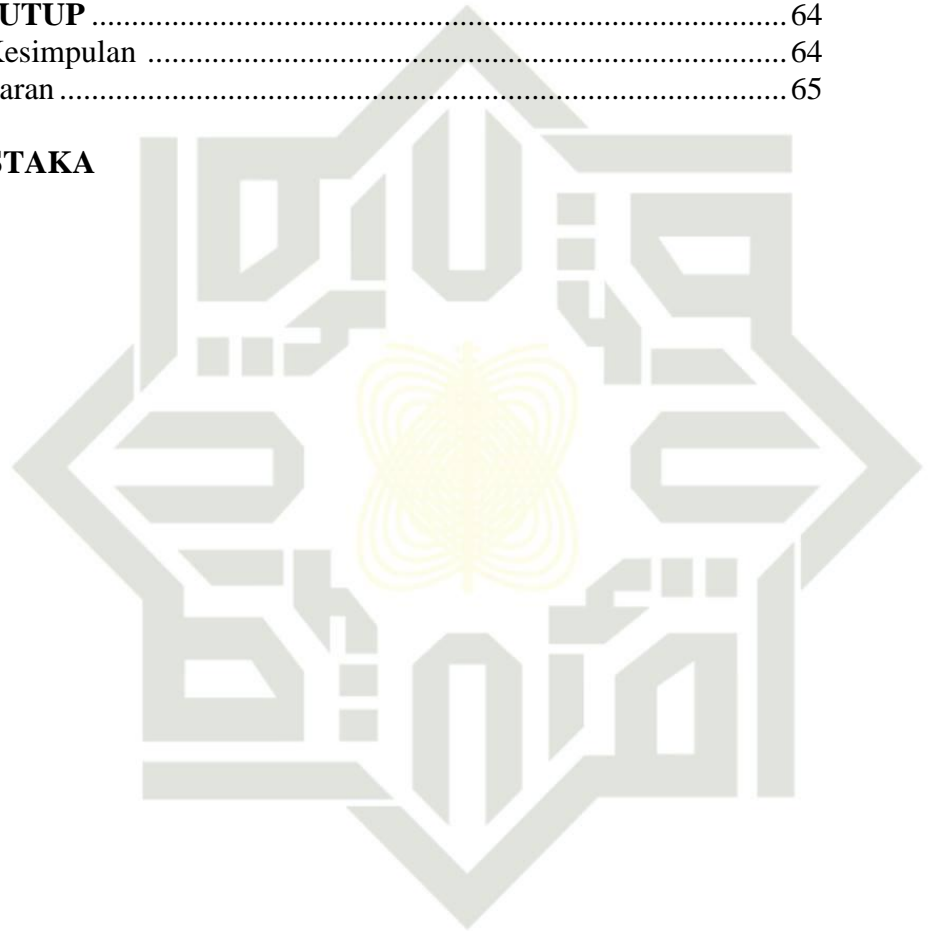
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru	47
B Tanggung Jawab Pengusaha atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru	56
BAB V PENUTUP	64
A Kesimpulan	64
B Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

1.1	Populasi dan Sampel.....	19
4.1	Alasan Responden Membeli Jamu Tradisional	48
4.2	Tanggapan Responden tentang Efek Samping dari Mengkonsumsi Jamu Tradisional.....	49
4.3	Tingkat Pengetahuan Responden Mengenai Keamanan dalam Mengkonsumsi Jamu Tradisional	51
4.4	Tindakan Responden yang Diambil Apabila Mengalami Efek Samping Akibat Mengkonsumsi Jamu Tradisional	52

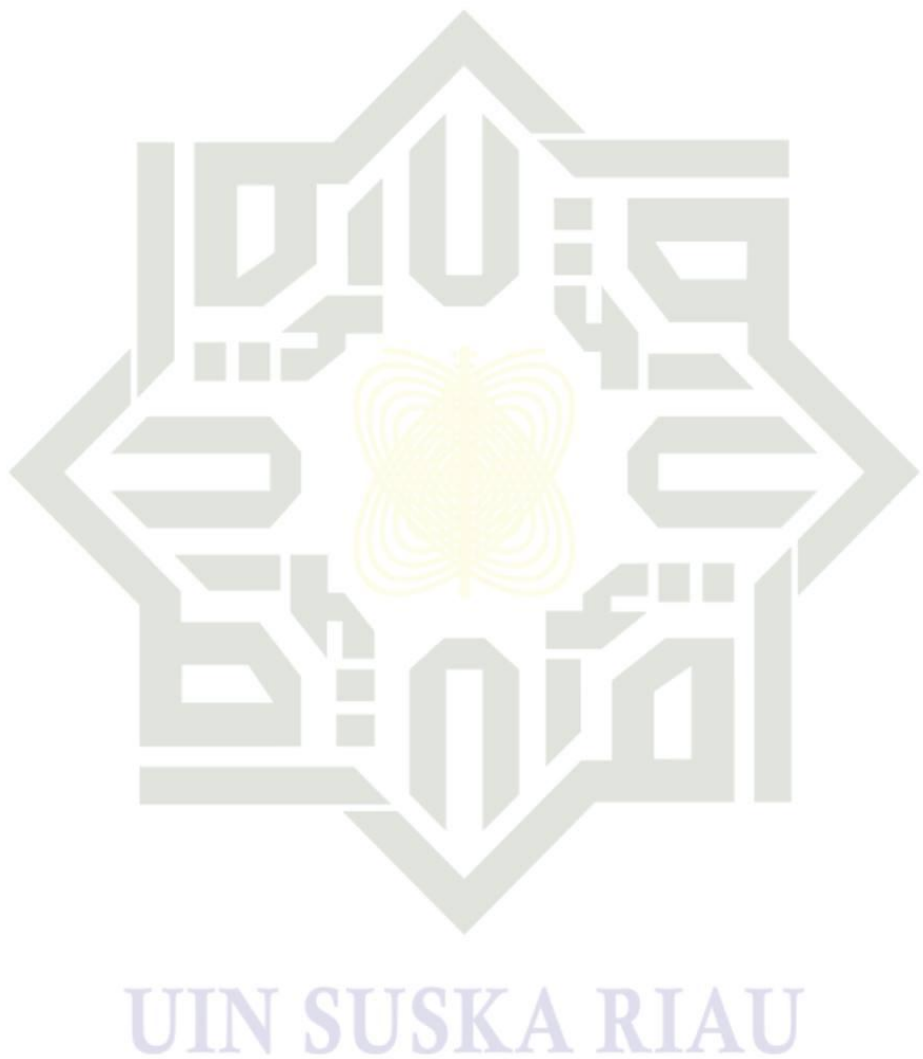
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

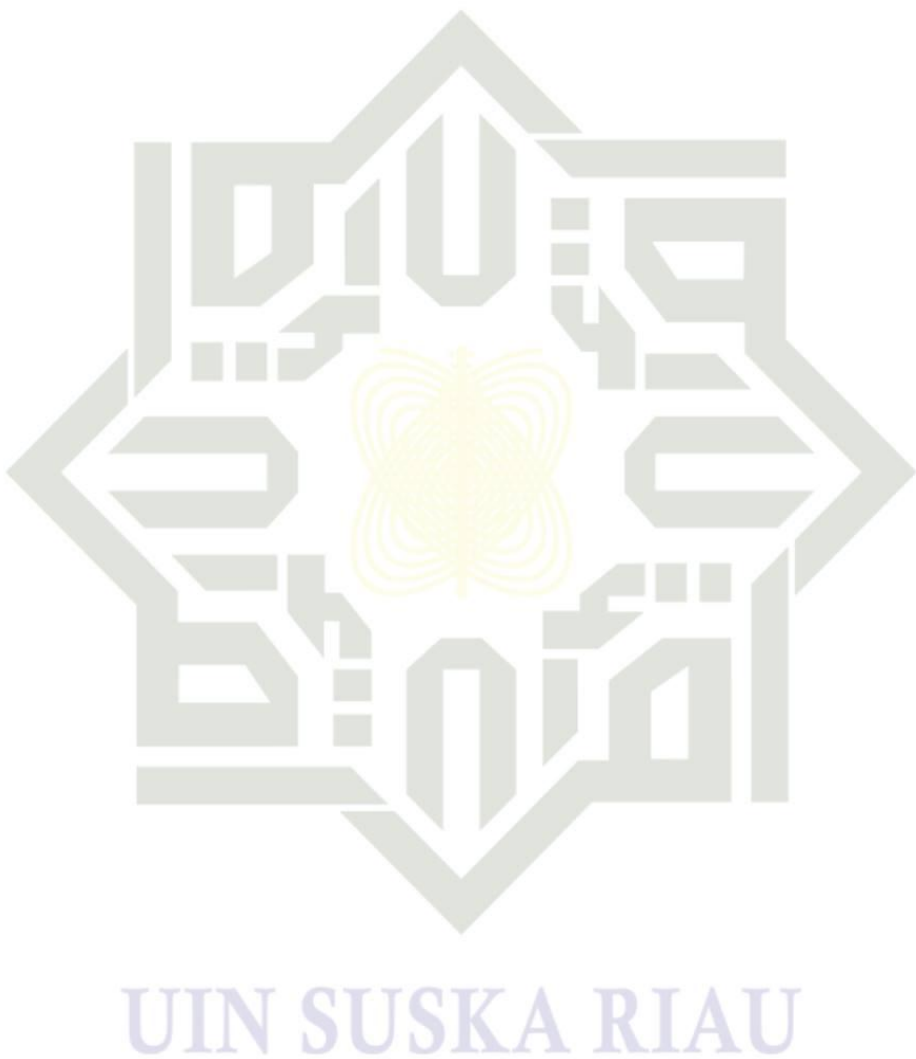
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru	42
--	----



DAFTAR LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan produk alam yang lebih dikenal dengan istilah jamu guna untuk penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan di kalangan masyarakat Indonesia memegang peranan yang sangat besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari produk alam merupakan warisan nenek moyang yang tidak diragukan lagi khasiatnya dan terus dikembangkan pemanfaatannya di berbagai daerah. Peranan jamu akan semakin terasa pada daerah-daerah terpencil, dimana sulit diperoleh pelayanan medis atau obat-obat modern. Disamping itu sebagian masyarakat masih banyak mencari pengobatan tradisional dan mencoba melakukan pengobatan sendiri dengan cara tradisional bila menderita sakit.¹

Jamu adalah obat tradisional Indonesia, obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah di standarisasi.²

Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan perawatan di luar kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan secara tradisional mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu kepada pengetahuan,

¹Wening Sari Lili Indrawati, *Care Yourself: Hepatitis*, Penebar Plus, Depok, 2008, h. 68.

²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun. Salah satu jenis obat tradisional adalah obat herbal. Istilah obat herbal mengacu pada kata *herb* yang berarti tanaman. Terdapat tiga kategori obat herbal, yaitu fitofarmaka, obat herbal terstandar jamu.³

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁴

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia bahwa jamu adalah obat tradisional Indonesia yang tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan pembuktian empiris atau turun temurun. Jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.⁵

Jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, tetapi masih ada juga jamu yang beredar di pasaran yang mengandung bahan obat kimia yang berbahaya. Jamu-jamu yang beredar tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan kematian. Proporsi jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya yang tanpa takaran memang

³ *Ibid*, h. 74

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional

⁵Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan jamu tersebut menjadi obat yang manjur ketika dikonsumsi tetapi, bila dikonsumsi dalam jangka panjang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat juga menyebabkan kematian. Semestinya jamu sebagai obat tradisional hanya diracik dari bahan alami, seperti tumbuhan dan akar-akaran. Khasiat jamu sebagai obat tradisional baru dirasakan setelah mengonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena dianggap kurang ampuh, maka banyak pabrik jamu serta pelaku usaha berlaku curang dengan membubuhi jamu-jamu itu dengan bahan kimia obat agar khasiatnya langsung terasa.⁶

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi yaitu sebagai pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Namun realitanya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya beredar di masyarakat, hal ini pula karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memproduksi atau membuat obat tradisional jamu sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan.⁷

Penegakan hukum terhadap kasus peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya belum berjalan optimal, sehingga membuat pelaku usaha dalam melakukan aksinya bisa secara leluasa. Produsen dan distributor jamu tradisional merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap jamu tradisional yang beredar di pasaran. Untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat pada era globalisasi saat ini, terkadang

⁶*Ibid.*

⁷Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha jamu tradisional melakukan tindakan-tindakan yang menghalalkan segala cara dengan melakukan berbagai pelanggaran dalam memproduksi jamu tradisional. Hal ini dilakukan agar mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.⁸

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru telah melakukan razia secara rutin terhadap apotek dan toko obat yang beroperasi di Pekanbaru. Hasil razia tersebut ditemukan toko obat yang menjual jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya, seperti jamu merek Akar Dewa yang diproduksi oleh UD. Citra Alam, Jawa Timur. Jamu ini mengandung bahan kimia piroxicam. Penggunaan piroxicam dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal.⁹

BPOM Pekanbaru juga telah mengeluarkan edaran mengenai daftar jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya ke pihak distributor dan toko-toko agar tidak menjual lagi jamu-jamu yang teridentifikasi oleh BPOM Pekanbaru yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya. Tetapi, jamu-jamu tersebut masih juga ada yang beredar di Pekanbaru. Selain di toko-toko obat, jamu-jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya juga dijual bebas secara *online*. Di salah satu situs jual beli *online* jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya masih diperjual belikan, seperti jamu Daun Binahong, dan Fung Se Gu Tong Wang, yang mengatasi asam urat, rheumatic, encik, flu tulang, dan sakit sendi.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 76.

⁹ <http://www.bpom.pku.com>, Diakses pada Tanggal 18 November 2018.

¹⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu lokasi peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya adalah Kecamatan Tampan Pekanbaru. Beberapa contoh jamu tradisional yang masih beredar di toko obat yang terdapat di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah jamu kapsul daun Binahong, Fung Se Gu Tong Wang kapsul, jamu buah Rosela, Tian Ma Tu Chung Seven Leaf, Seven Leaf Ginseng dan jamu bunga Teratai yang merupakan jamu untuk mengatasi asam urat, rheumatic, encok dan flu tulang. Juga jamu-jamu untuk meningkatkan vitalitas seksual. Jamu-jamu tersebut masih beredar bebas di toko-toko obat Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia.¹¹ Namun pada kenyataannya obat tradisional jamu yang beredar dipasaran mengandung bahan kimia berbahaya yang mana berdampak negatif bagi kesehatan konsumen.

Masyarakat diminta untuk waspada terhadap perdagangan produk jamu yang berbahan kimia/zat berbahaya karena peredarannya semakin marak dengan ditemukannya beberapa peredaran jamu yang dicampur dengan bahan kimia/zat berbahaya. Selain merusak citra perjamuan dan obat-obatan tradisional Indonesia yang mengedepankan dan menggunakan bahan-bahan alami, jamu yang terbuat dari bahan kimia obat juga bisa mengancam jiwa konsumen. Jamu adalah obat

¹¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional leluhur yang dari dulu sudah terbukti khasiatnya, tetapi penyimpangan dalam pembuatannya dengan menggunakan obat kimia zat berbahaya dapat mengakibatkan efek samping yang sangat besar bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. Masyarakat diharapkan saat memilih jamu sebagai obat tradisional harus melihat tanda registrasi terdaftar di BPOM. aturan pakai jamu tersebut, digunakan untuk penyakit apa, komposisinya dan sebagainya. Jika tidak ada hal seperti itu atau minimal harus ada tanda registrasi BPOM, maka jamu tersebut tidak boleh dikonsumsi.¹²

Pada saat ini perkembangan perkembangan peredaran jamu sebagai obat tradisional yang semakin tidak terkendali. Peredaran jamu saat ini sudah berkembang pesat baik dijual secara langsung maupun secara *online*. BPOM Pekanbaru telah berusaha maksimal di dalam melakukan pengawasan terhadap jamu-jamu yang beredar di Pekanbaru, tetapi karena cakupan area Pekanbaru yang luas dan lokasi penjual yang terpelosok serta teknik promosi yang beragam seperti menggunakan media sosial menjadi keterbatasan BPOM Pekanbaru di dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk jamu tersebut.

Negara memberi perlindungan hukum bagi warga negaranya dari setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha agar terjadi adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya masing-masing dari para pihak. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya bisa terimplementasi

¹²Wening Sari Lili Indrawati, *Op.cit*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik dan menjadi sebuah jembatan dari setiap sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Serta guna terlindunginya para konsumen dari jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat berbahaya.¹³

Hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.¹⁴ Hukum perlindungan konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁵

Tujuan perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dari dampak negatif kekuatan pasar yang cenderung dapat merugikan konsumen serta untuk melindungi hak-hak konsumen.¹⁶ Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan.¹⁷ Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.¹⁸

¹³Ibid, h. 82.

¹⁴Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, PIRAC, Jakarta, 2011, h. 23.

¹⁵M. Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2012, h. 154.

¹⁶Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.19.

¹⁷Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 22.

¹⁸Susanti Adi Nugroho, *ProsesPenyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah di dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya yang diperjual belikan baik secara langsung maupun secara *online* dengan menggunakan media sosial di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang hukum acara secara umum dan hukum acara perdata bisnis secara khusus serta memperdalam pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menambah bahan hukum, informasi dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam orientasi dan ruang lingkup penelitian yang sama.
3. Secara praktis, diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan dalam menangani perlindungan hukum terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Studi Kepustakaan

Menurut Permenkes nomor 246 tahun 1990 pasal 1 ayat 1 tentang obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana

¹⁹ Permenkes no 246 tahun 1990 pasal 1 ayat 1 tentang obat tradisional

²⁰ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.²¹

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²²

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia.²³

Obat tradisional bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Misalnya jamu adalah obat tradisional yang merupakan ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Obat tradisional sudah sejak lama

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

²² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional bahwa obat tradisional

²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan secara luas di Indonesia. Dalam perkembangan pelayanan kesehatan formal, peran obat tradisional sebagai pendamping obat modern masih nyata. Namun sampai sekarang masih ada golongan obat tradisional yang belum pernah dinilai secara ilmiah baik mengenai efektivitas maupun keamanannya.²⁴

Obat tradisional oleh Departemen Kesehatan diklasifikasikan sebagai jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu ialah obat tradisional yang didasarkan pada pendekatan warisan turun-temurun atau pendekatan empirik. Sedangkan obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang didasarkan pada pendekatan ilmiah melalui uji pra-klinik. Selain itu, fitofarmaka merupakan obat tradisional yang didasarkan pada pendekatan ilmiah yang telah diuji melalui uji pra-klinik dan uji klinik.²⁵

Perlindungan konsumen merupakan salah satu fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang demikian halnya dengan hukum perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.²⁶ Kondisi konsumen di Indonesia masih sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.²⁷ Permasalahan ketidakseimbangan kedudukan konsumen tersebut dijabatani oleh hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari

²⁴M. Lies Suprati, *Teh Jamsi dan Manisan Nat*, Kansius, Bandung, 2003, h. 7-8.

²⁵Departemen Kesehatan, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2007, h. 11.

²⁶Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ub Press, Malang, 2011, h.42.

²⁷Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah- kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁸

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.²⁹ Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kepastian hukum tersebut, meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya, serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandiriannya, melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen. Tentunya pemberdayaan konsumen ini dapat dilakukan dengan

²⁸Az Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 65.

²⁹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000, h. 17.

menghindari akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.³⁰

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³¹

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*).³²

³⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h.16.

³¹Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 39.

³²Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³³

a) Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

³³Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “pemakai” sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Dengan kata lain dasar hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).³⁴

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.³⁵

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan dalam pasal ini dijelaskan

³⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 1-2.

³⁵NHT Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.³⁶

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dan toko obat serta apotek di Kecamatan Tampan Pekanbaru, penulis bisa mendapatkan data-data lengkap tentang peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Pekanbaru

G. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.³⁷

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Soeryono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, h. 33.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertegas hipotesa–hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori–teori lama atau dalam kerangka menyusun teori–teori baru.³⁸

2. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus–kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala bidang penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.
2. Anggota seksi inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.
3. Pengusaha apotik dan toko obat di Kecamatan Tampan Pekanbaru
4. Konsumen

b) Sampel

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode sensus dan metode *purposive sampling*. Sensus adalah penetapan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Responden untuk Kepala bidang penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru menggunakan metode sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sedangkan *purposive sampling* adalah penetapan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Responden untuk anggota seksi inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan

³⁸Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2002, h. 10

³⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h.

(BPOM) Pekanbaru menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada Tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1.
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala bidang penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.	1	1	100%
2.	Anggota seksi inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.	10	5	50%
3.	Pengusaha apotik dan toko obat di Kecamatan Tampan Pekanbaru	61	35	60%
4.	Konsumen	70	35	50%
Total		142	76	

Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2018.

3. Data Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dan kuisioner dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.
- 5) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokkan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- c. Angket, yaitu responden mengisi kuisioner yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu kesimpulan diperoleh dari kasus-kasus khusus menuju suatu atribut yang bersifat umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- c) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁴³

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁴⁴

Teori perlindungan hukum menurut Salmond adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴⁵

B. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁴⁶ Pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa

⁴³Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, h. 64.

⁴⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h. 38.

⁴⁵Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, *Jurnal UIS*, Vol. IV No. 2, 2016, h. 2.

⁴⁶Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fhuipers, Yogyakarta, 2013, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴⁷

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).⁴⁸

Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan suatu peranan, yakni peranan yang merupakan hak dan kewajiban ataupun suatu kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum itu daitikan

⁴⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 77.

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu yang tidak menimpang dari peraturan-peraturan yang ada.⁴⁹

Perihal prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena akan sangat diperlukan dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak tersebut. Ada beberapa prinsip tanggung jawab yang secara umum dapat dibedakan menjadi:⁵⁰

- a) *Liability based on fault* (kesalahan);
- b) *Presumpsition of liability* yakni praduga selalu bertanggung jawab;
- c) *Presumption of nonliability* yakni praduga tidak selalu bertanggung jawab;
- d) Tanggung jawab mutlak yaitu *limitation of liability*;
- e) Pembatasan tanggung jawab yaitu *limitation of liability*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*profesional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan tanggungjawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.⁵¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk dan tanggungjawab profesional dimuat dalam Pasal 8 hingga Pasal 17, 19, 23, dan 28. Adapun pelanggaran

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Shidarta, *op.cit*, h. 59.

⁵¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Pasal 8 hingga Pasal 12 dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62. Ketentuan yang lebih tegas terkait dengan *product liability* dan *profecional liability* terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵²

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen atas setiap produk makanan yang dibeli. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.⁵³

Tujuan perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dari dampak negatif kekuatan pasar yang cenderung dapat merugikan konsumen serta untuk melindungi hak-hak konsumen.⁵⁴ Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting mengingat bahwa pembangunan nasional, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi berdasarkan

⁵²*Ibid.*

⁵³Dian Lestari Hura, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, h. 3.

⁵⁴Dedi Harianto, *op.cit*, h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945, pembangunan perekonomian di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.⁵⁵

Dari segi isinya ada tiga model pendekatan dalam upaya perlindungan konsumen dibawah undang-undang, sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pendekatan sektoral. Artinya, hak-hak konsumen diakomodir dalam berbagai produk undang-undang sektoral. Contohnya hak-hak konsumen pangan diatur dalam Undang-Undang Pangan, dan seterusnya;
- 2) Pendekatan holistik, ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi payung undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen;
- 3) Pendekatan gabungan. Selain ada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus, untuk hal-hal yang lebih detail dan teknis masih dipertegas dalam undang-undang sektoral. Di Indonesia pendekatan inilah yang dipakai oleh pemerintah.

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan

⁵⁵Wahyudi Ramadhan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Tingkat Pasar Tradisional (Studi Pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bone), *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 2.

⁵⁶Az Nasution, *op.cit*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan penggunaan barang dan/atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.⁵⁸

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diterima dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, h. 37.

⁵⁸ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, h. 2

⁵⁹ Yusuf Shofie, *op.cit*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁶⁰

a) Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

⁶⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:⁶¹

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan tujuan umum yang dikemukakan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keenam tujuan khusus tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum. Rumusan huruf c dan huruf e termasuk ke dalam tujuan

⁶¹ *Ibid*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. Terakhir tujuan kepastian hukum terlihat dalam huruf d.⁶²

D. Tinjauan Umum tentang Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam kepastasaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.⁶³

Hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, John. F. Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 maret 1962.

Hak-hak tersebut terdiri dari:⁶⁴

- 1) Hak untuk memperoleh keamanan;
- 2) Hak memilih;
- 3) Hak mendapat informasi;
- 4) Hak untuk didengar.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

⁶² *Ibid*, h. 37.

⁶³ Ahmadi Miru, *op.cit*, h. 4.

⁶⁴ *Ibid*, h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Sebelum menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen sendiri memiliki kewajiban sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

E. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditemukan istilah pelaku usaha. Undang-undang merumuskannya sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁶⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak-hak konsumen tetapi juga mengatur perilaku pelaku usaha sehingga secara tidak langsung juga akan turut mempengaruhi perilaku dunia usaha untuk melakukan persaingan yang lebih sehat dan jujur. Untuk mengatur perilaku pelaku usaha maka Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁶⁵ Ahmadi Miru, *op.cit*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha tidak hanya menerima hak saja pelaku usaha juga dibebankan oleh sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus ditaati sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

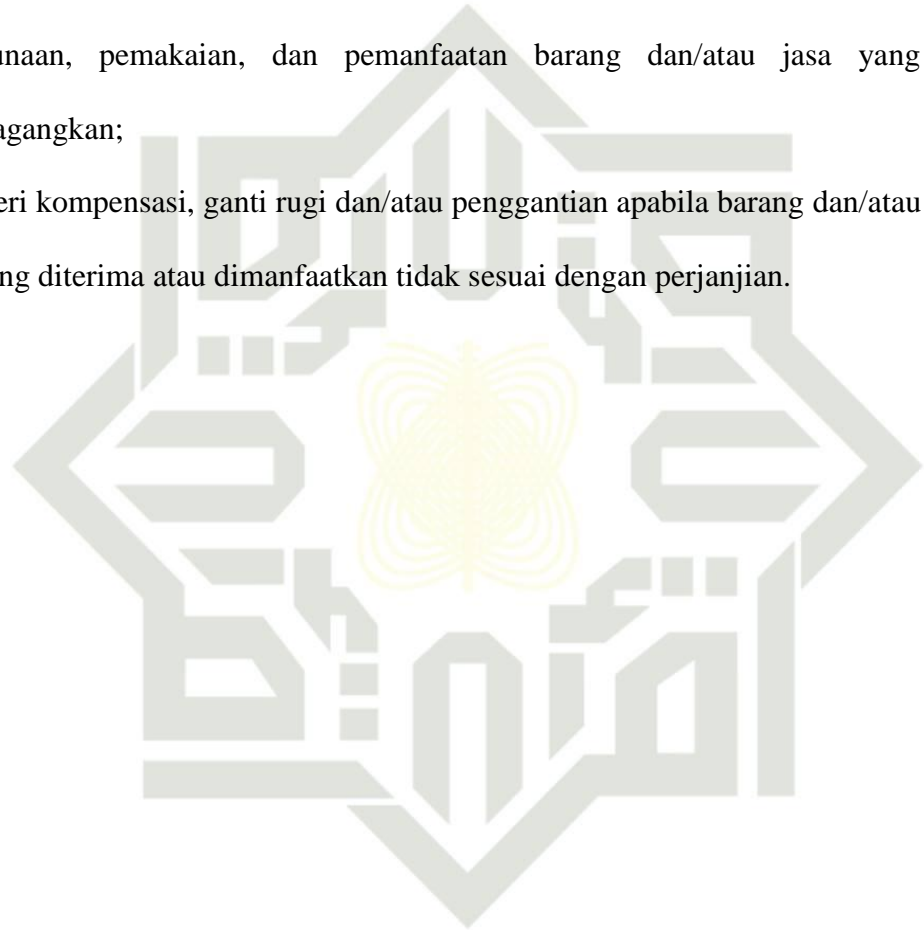
Kewajiban-kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

Balai Besar POM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.⁶⁶

Latar belakang terbentuknya Balai Besar POM adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.⁶⁷

⁶⁶ <http://www.bpom.pku.com>, Diakses pada Tanggal 25 Maret 2019.

⁶⁷ *Ibid.*

B. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan

Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda (katakata,tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan BPOM sendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:

- a. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri.
- b. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri.
- c. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- d. PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan, kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru

BBPOM Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan. Adapun visi dan misi Balai Besar POM Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi dari Balai Besar POM :

- 1) Menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif
- 2) Kredibel, dan
- 3) Diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

Misi dari Balai Besar POM :

- 1) Melakukan pengawasan *pre-market* dan *pos-market* berstandar internasional.
- 2) Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten
- 3) Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini.
- 4) Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
- 5) Membangun organisasi pembelajar (*learning organization*)

D. Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :⁶⁸

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

⁶⁸ http://www.pom.go.id/pom/profile/visi_misi.php. diakses pada 27 Maret 2019, Pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;

E. Aktivitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang

pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- e) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.
- f) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- g) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.

Balai Besar POM Pekanbaru merupakan Balai Besar yang mengawasi berbagai macam jenis obat-obatan dan produk makanan di Kota Pekanbaru yang terdiri dari :

- 1) Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- 2) Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

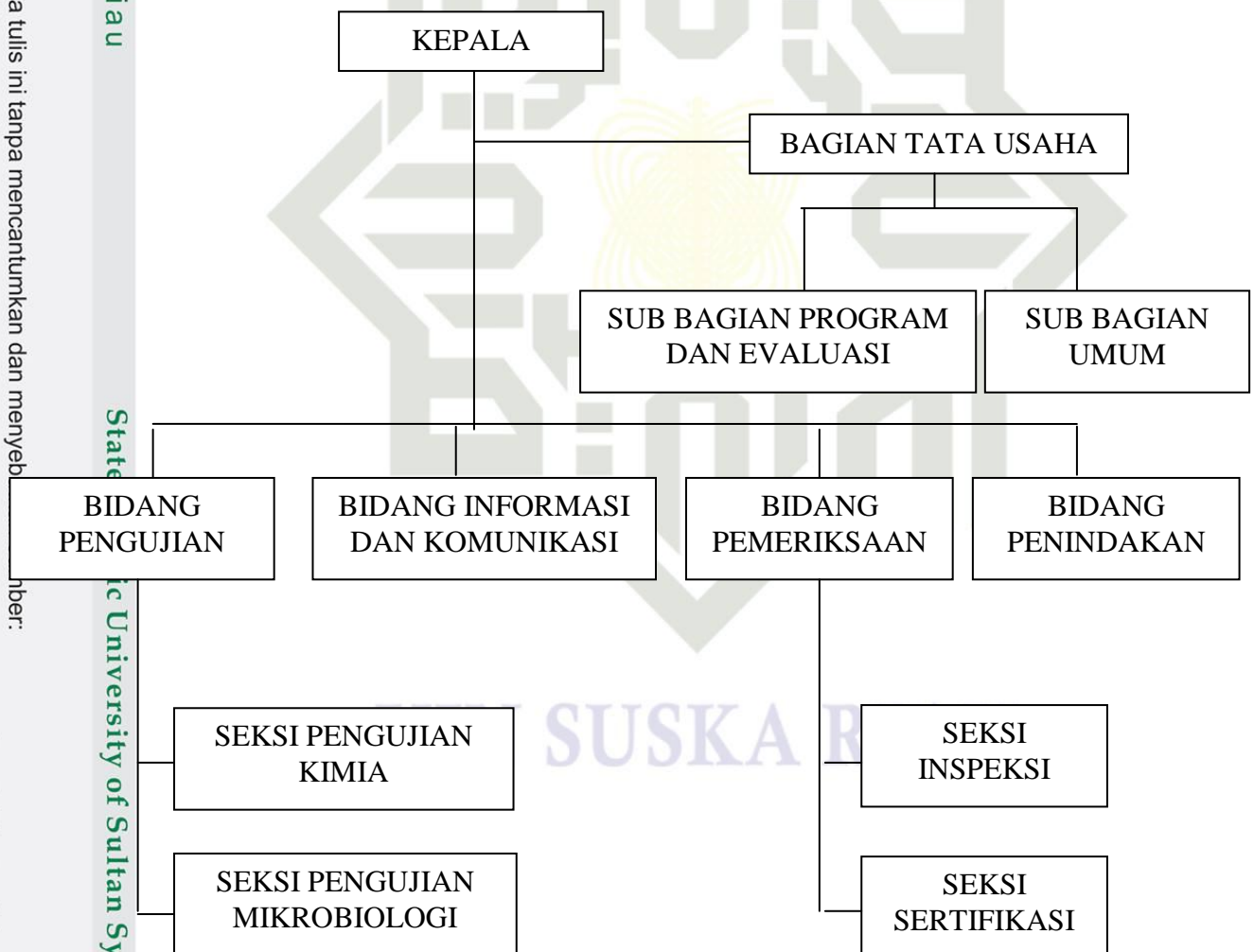
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
- 4) Bidang Setifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

F. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru



Sumber: Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, 2018.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan wewenang struktur organisasi Badan pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya; membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

2. Bagian Tata usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan pelayanan administrasi

3. Bidang pengujian

Bidang Pengujian Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu laboratorium pengawasan obat dan makanan. Bidang Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding;
- b. Pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding; dan

d. Pelaksanaan urusan administrasi

4. Bidang informasi dan komunikasi

Bidang Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi keracunan dan teknologi informasi. Tugas bidang informasi adalah :

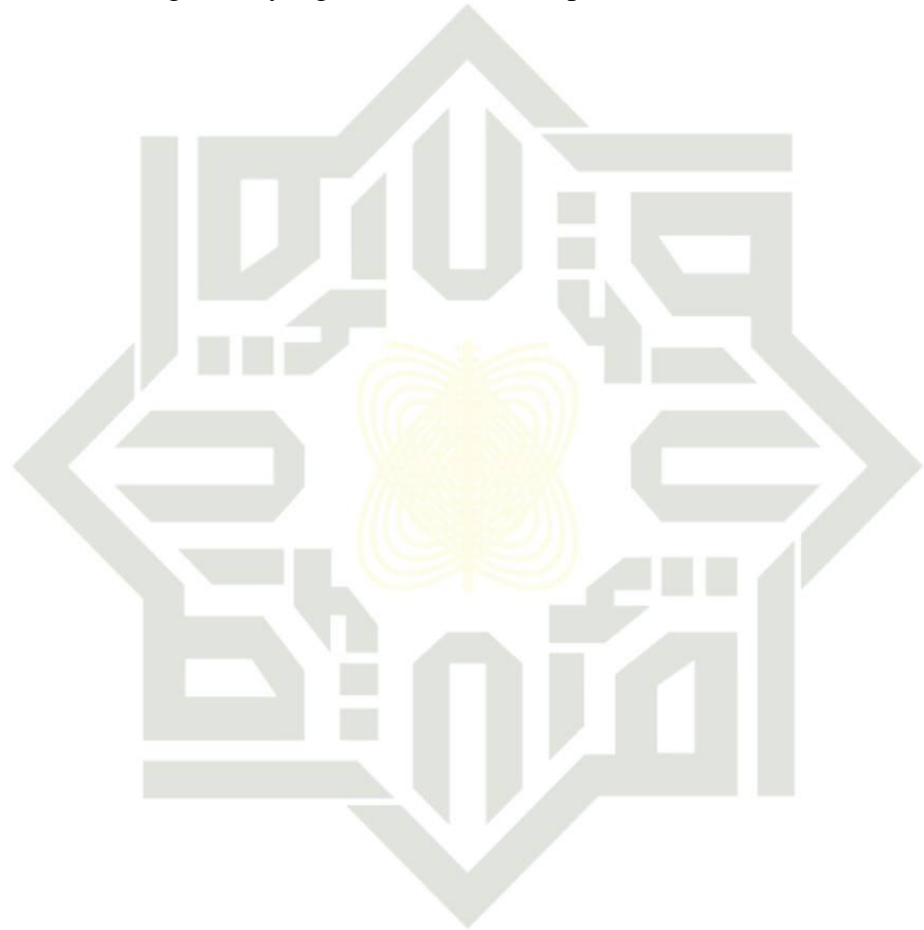
- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pelayanan informasi obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi obat;
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat
5. Bidang pemeriksaan
- Bidang pemeriksaan Obat dan Makanan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya
6. Bidang penindakan
- Bidang penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah dengan cara melaksanakan peraturan yang berlaku dengan tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang juga pemberian ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha adalah tidak akan menjual dan melakukan pengembalian kepada distributor atas jenis-jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dan melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlanjur membeli jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

B. Saran

1. Badan atau instansi yang terkait seharusnya seperti BPOM Pekanbaru dan pihak kepolisian saling bekerja sama secara konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat tradisional baik sebelum jamu tradisional beredar di pasar maupun setelah obat tradisional beredar di pasaran.
2. Pengusaha yang menjual jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya seharusnya melakukan pengembalian kepada distributor dan tidak menjual kembali jamu-jamu tersebut. Juga pengusaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah terlanjur membeli produk jamu tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2009, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Nusa Media. Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harianto, Dedi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Indrawati, Wening Sari Lili. 2008, *Care Yourself: Hepatitis*. Penebar Plus. Depok.
- Kesehatan, Departemen. 2007. *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, Jakarta Departemen Kesehatan.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fhuiipers, Yogyakarta.
- Kristiyanti, Celiana Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ub Press. Malang.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Nasution, Az. 2005. *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *ProsesPenyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sadar, M., dan Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Shofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Gahlia Indonesia. Jakarta.
- Siahaan, NHT. 2005. *Hukum perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Grafika Mardi Yuana. Bogor.
- Sidabalok, Janus. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya. Bandung.
- Soekanto, Soeryono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Sudaryatmo, 2011, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, PIRAC, Jakarta.
- _____, 2006, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rajawali Pers. Jakarta.
- Suprati, M. Lies. 2003. *Teh Jamsi dan Manisan Nat*. Kansius. Bandung.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokkan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.

C. Jurnal

Asri, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal UIS*, Vol. IV No. 2.

Hura, Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4.

Ramadhan, Wahyudi, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Tingkat Pasar Tradisional (Studi Pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bone), *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, Vol. 2, No. 1

Website

<http://www.bpom.pku.com>, Diakses pada Tanggal 18 November 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT PENULIS

AMRIJAL, dilahirkan di Ajamu pada tanggal 29 April 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Khojali dan Juliani, saat ini penulis tinggal di jalan kubang raya , perumahan griya kencana. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 003 Bagan Batu tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTS) An'nur Bagan Batu tamat pada tahun 2010 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapim Taruna Bagan Batu yang tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2017 Penulis melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Utama Karya kecamatan Kampar Kiri Tengah. Pada tanggal 09 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)” .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.